

## PAHAM "NASIONALISME BARU" UNTUK INDONESIA

Soetandyo Wignjosebroto

### Pendahuluan

Nasionalisme adalah suatu paham politik yang meyakini kebenaran suatu dalil bahwa manusia sebangsa itu sudah seharusnya—demi masa depannya yang jaya—bersatu dalam suatu satuan organisasi politik yang disebut negara. Paham seperti ini sebenarnya merupakan paham yang relatif baru. Dalam sejarah, paham seperti ini baru marak untuk pertama kalinya di negeri-negeri Eropa Barat, kira-kira selepas abad 16. Sebelum masa itu, bolehlah dikatakan bahwa ketatanegaraan Eropa diorganisasi di seputar satuan-satuan teritori yang menurut tradisinya merupakan kekayaan raja-raja atau dinasti keturunannya.

Tak salah kalau dikatakan bahwa pada abad-abad pertengahan pada masa itu, di bagian benua Eropa itu, *the making of Europe is the making of kings and queens*. Dalam situasi kekuasaan raja-raja seperti itu, yang namanya 'bangsa' itu tak lain daripada 'wangsa' alias dinasti berikut seluruh penduduk yang menghamba sebagai rakyatnya. Maraknya kesadaran berbangsa dan paham kebangsaan telah mengubah sejarah Eropa Barat. Revolusi-revolusi pemikiran di peralihan abad 17-18 telah menjadikan *the making of Europe is the making of nation*, sedangkan revolusi-revolusi

kerakyatan pada akhir abad 18 telah kian memantapkan kenyataan itu..

Sejelas itu perkembangan kesadaran dan paham kebangsaan, sejelas itu pula riwayat kelahiran paham politik yang meyakini kebenaran upaya untuk membangun kehidupan bernegara atas dasar satuan bangsa (sehubungan dengan perubahan sosial-politik di Eropa itu), namun tidak segera bisa dipahami dengan jelas apa sebenarnya yang kini harus didefinisikan sebagai 'bangsa' itu. Dalam perkembangan seperti itu, orang mulai mewacanakan, 'apakah yang disebut bangsa itu?'. Bangsa bukanlah suatu realitas objektif melainkan suatu realitas inter-subjektif yang eksis di dalam alam imajinasi para warga sekolektiva.

Definisi yang klasik mengartikan 'bangsa' (yang dalam bahasa asingnya diistilahkan *nation*<*natio*<*naitre* yang berarti kelahiran) dalam artinya yang harafiah. Didefinisikan secara klasik begitu, dikatakanlah bahwa satuan manusia yang disebut bangsa itu tak lain adalah suatu *natio*, ialah sejumlah manusia yang sedarah seketurunan, berasal-usul kelahiran dari satu moyang yang sama. Akan tetapi, definisi seperti ini dalam praktiknya tidaklah pernah dapat memberikan tolok yang jelas dan tegas guna memungkinkannya penentuan secara

## Nasionalisme: Kesadaran Bernegara Bangsa dan Berkesamaan Budaya sebagai Dasar Legitimasi Terbentuknya Negara-bangsa

Kesadaran berbangsa, apapun tolok asumsi yang dipakai untuk mendefinisikan 'bangsa', adalah sesungguhnya sebuah awal yang akan berkembang secara sistematis ke wujudnya sebagai suatu ideologi yang disebut nasionalisme. Seperti telah dikatakan di muka, nasionalisme adalah suatu paham politik yang meyakini kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa itu— demi ketahanan hidup dan kejayaannya— seharusnya bersatu bulat ke dalam suatu komunitas politik yang diorganisasi secara rasional ke dalam suatu kehidupan bernegara. Dari nasionalisme inilah lahirnya ide dan usaha perjuangan politik untuk merealisasi terwujudnya suatu negara bangsa. Yang masih menjadi masalah di sini ialah, ketika euforia politik mulai mereda, sekuat apapun paham nasionalisme itu, apakah tegaknya suatu *nation* itu dapat diupayakan begitu saja tanpa menghadirkan landasan kultural yang solid?

Telah dikatakan pula, bahwa kehidupan berbangsa itu adalah kehidupan yang terkonstruksi di atas landasan identitas yang cenderung abstrak dan imajiner. Kehidupan berbangsa tidaklah sekonkrit, seempirik atau seobjektif kehidupan suku (*tribal life*) atau mungkin juga kehidupan sukubangsa (*ethnic life*), yang jelas merupakan suatu

konkrit, empirik dan objektif. Dalam kehidupan suku dan sukubangsa, tradisi dan kebudayaan itu merupakan pengalaman manusia warga sehari-hari dan berfungsi amat signifikan sebagai rujukan normatif yang sentral dan berdaya *integrative*. Maka akan menjadi persoalan yang pelik, apakah dalam kehidupan berbangsa modern *beyond the tribal and ethnic life* itu upaya membangun kesadaran dan solidaritas politik saja sudah cukup? Adakah kehadiran suatu bangsa modern sebagai suatu realitas akan dapat dipertahankan dan dilestarikan tanpa kehadiran kesadaran berkesamaan tradisi dan/atau budaya?

Sejarah mencatat bahwa suatu bangsa modern yang berkembang di atas suatu infrastruktur budaya etnik tua yang tunggal umumnya akan lebih mampu bertahan kukuh daripada suatu bangsa yang dibangun di atas suatu infrastruktur suku dan budaya yang heterogen dan terpilah-pilah, menggambarkan adanya fakta yang serba partikular, seakan-akan akan mencabar ideologi nasionalisme yang mencitakan unifikasi. Partikularitas sosio-kultural demikian ini akan menimbulkan *problem* besar di negerinegeri yang tak mengenal adanya homogenitas kultural. Kenyataan sejarah kontemporer menunjukkan betapa nasionalisme dan solidaritas politik nasional dalam kehidupan berbangsa bangsa Jepang atau Thai— yang terbangun dari landasan sosio-kultural yang amat tua— nyata kalau lebih perkasa daripada manakala

pengalaman Srilanka atau Yugoslavia atau Irak dan Turki dengan suku Kurdinya.

Selama ini Srilanka terbukti gagal membangun nasionalisme yang mengatasi etno-nasionalisme suku-suku Singhala dan Tamil dan telah gagal pula membangun tradisi besar yang baru dan inklusif untuk mengatasi tradisi eksklusif suku-suku itu. Terbukti pula bagaimana para pemuka Yugo—setelah mengupayakannya berdasawarsa lamanya—telah gagal membangun rasa dan semangat kebangsaan baru yang mengatasi identitas etnik-etnik Bosnia, Serbia dan Kroatia yang menjadi elemen-elemennya. Maka, tak ayal lagi bangsa-bangsa di negeri-negeri itu, karena gagal membangun suatu suprastruktur politik dan kultur yang dapat mengatasi gerak sentrifugal elemen-elemennya, terbukti kalau mengalami berbagai kesulitan besar, yang bahkan sampai mengalami kegagalan untuk mempertahankan eksistensinya.

Apapun upaya orang untuk menegaskan nasionalisme sebagai ideologi politik, variabel kultural rupanya tidaklah dapat diabaikan begitu saja sebagai salah satu faktor determinan atau predeterminan yang tak dapat diabaikan. Tradisi lokal yang berkembang sepanjang sejarah eksistensi suku-suku etnisitas tua terbukti merupakan predeterminan politik dan ide-ide serta ideologi politik, tak kurang-kurangnya juga tersimak dalam kehidupan bangsa-bangsa baru.

Nasionalisme Perancis dan nasionalisme Jerman, misalnya, jelas terlihat berbeda sehubungan dengan perbedaan tradisi dan konsep kultural tentang makna kekuasaan, sekalipun Perancis dan Jerman itu adalah sama-sama Eropa dan pada dasarnya sama-sama mewarisi tradisi Yudea-Kristiani. Perbedaan itu akan semakin nyata manakala perbandingan wujud nasionalisme diperluas untuk pula menyanding-nyandingkan nasionalisme sebagaimana yang terbangkit di Cina atau Jepang, yang dalam pemahaman kultur bangsa-bangsa ini terkonsepkan adanya legitimasi kekuasaan negara yang jelas-jelas berasal dari "kekuasaan yang di atas sana", dan bukan dari "mereka yang manusia di bawah sini".

Maka, demi fungsinya dalam jangka panjang, tidaklah akan salah lagi bila nasionalisme modern sebagai kekuatan pengintegrasikan akan memerlukan kekuatan penopang yang lebih riil namun inspiratif, ialah kekuatan budaya yang mempunyai akar tradisinya dalam kehidupan kelompok-kelompok etnik setempat. Legitimisasi setiap penggunaan kekuasaan politik tidaklah akan cukup kalau cuma mendasarkan diri pada produk-produk legislatif yang termonopoli di tangan para pejabat pengemban kekuasaan negara, yang sayangnya (atau celakanya?) banyak yang tidak lagi mengenal *the first culture of the local (ethnic) people*. Padahal, khususnya lagi pada tahap-tahap implementasinya, variabel-variabel sosial dan

berbicara sebagai determinan, atau setidaknya-tidaknya sebagai pemengaruh yang tak dapat diabaikan begitu saja.

### Masalah Pluralitas Budaya dan Bangkitnya Kembali Etnonasionalisme

Negeri-negeri baru yang dibangun di atas puing-puing kekuasaan kolonial, adalah negeri-negeri yang tercipta sebagai hasil penciptaan suprastruktural kekuasaan asing yang berkultur homogen namun tak memperhatikan homogenitas wilayah-wilayah jelajahan yang dikuasainya. Perbatasan-perbatasan ditetapkan sepihak tanpa memperhatikan lingkaran-lingkar kewilayahan budaya (*Kulturr-kreise*) yang ada. Banyak migrasi yang melalu-lalangan sekian banyak suku asing juga berlangsung melintasi wilayah-wilayah kultural suku-suku asli untuk kemudian menetap di tempat tanpa terjadinya integrasi-integrasi budaya yang signifikan. Semua yang terjadi semasa dan sepanjang masa kekuasaan kolonial ini telah banyak menimbulkan sekian banyak rumpun kultural bangsa-bangsa tua, seperti misalnya rumpun Melayu atau rumpun Kurdi, yang terbelah-belah oleh perbatasan-perbatasan kawasan politik.

Bangkitnya kesadaran berbangsa yang berujung pada paham ideologik nasionalisme yang lewat perjuangan politiknya berhasil mendirikan negara baru, menuruti model negara teritorial yang berasal dari Barat, namun demikian terbukti mengalami kesulitan

rumpun-rumpun kewilayahan kultural untuk dapat setumpang-tindih dengan kewilayahan politik yang berada dalam lingkup perbatasan teritorial negara nasional yang baru ini. Tak ayal lagi, negara-negara baru ex-negeri kolonial ini hampir tanpa kecualinya mengalami persoalan keragaman kultural-religius, kemajemukan suku atau etnik, yang apabila di luar kontrol berkembang ke arah terjadinya nasionalisme kedae- rahan atau etno-nasionalisme maka kesatuan nasional dalam maknanya yang politik akan menjadi amat terganggu.

Etno-nasionalisme gampang meng- ilhami banyak eksponen untuk membangun kembali komunitas politiknya sendiri yang memisah dari komunitas politik besar yang bertumpu pada supranasionalisme antaretnik. Kesadaran etnonasionalisme yang lebih bernuansa kultural dan historik daripada bernuansa politik serta ekonomi yang ahistorik itu akan kian membara dan marak manakala dalam komunitas politik yang supranasiona- listik itu terkesan dominannya peran kekuasaan yang teridentifikasi sebagai peran kekuasaan etnik tertentu, yang boleh diprasangkai telah terjadinya apa yang disebut *internal kolonialism* (yang tak hanya terasa di bidang kehidupan kultural akan tetapi lebih- lebih lagi di bidang politik dan ekonomi).

Pengalaman Indonesia dengan permasalahan Aceh dan Papua-nya, Srilanka di Asia Selatan dengan

nya, adalah beberapa contoh saja. Permasalahan serupa juga dialami Yugoslavia dan Rusia di Eropa Timur, Ghana dan Rwanda di Afrika dan bahkan juga Kanada di Amerika Utara atau Spanyol dengan permasalahan suku Basque-nya adalah juga sejumlah contoh yang pantas diperhatikan dan dipelajari dengan sungguh-sungguh.

Apa yang terjadi di negeri-negeri itu memberikan pelajaran nyata bahwa pluralitas sehubungan hadirnya berbagai kelompok etnik berikut infrastruktur budaya mereka dalam suatu kehidupan nasional yang modern itu, bagaimanapun juga, akan tetap merupakan anasir pembangun yang penting dalam konstruksi politik suatu bangsa. Manakala diabaikan, boleh diduga —entah cepat, entah lambat— kekuatan nasionalisme akan tererosi, dan dengan demikian juga akan gampang menggoyahkan sendi-sendi politik di negara-bangsa yang bersangkutan.

Di dalam kehidupan negara-bangsa yang berbudaya majemuk, setiap langkah pengembangan kultur politik selalu saja menghadapkan orang kepada keterpaksaan untuk membuat pilihan-pilihan atau pemihakan-pemihakan yang acapkali sungguh rumit. Terjadilah berbagai permasalahan dilematik yang memusingkan. Pada awalnya, banyak eksponen nasionalis yang larut dalam kampanye anti-kolonial mencoba mengabaikan fungsi budaya etnik sebagai kekuatan

nasionalis ini—dengan semangat modernisasinya— mengkhawatirkan akan terjadinya disrupsi-disrupsi apabila kesetiaan-kesetiaan tradisional pada segala sesuatu yang bersifat etnik itu terlalu ditenggang. Dikhawatirkan bahwa kesetiaan kepada tradisi lokal hanya akan mencuatkan sukuisme, yang pada gilirannya akan mengganggu solidaritas nasional dan kehidupan berbangsa. Perkembangan yang berkesan anti-tradisi seperti ini ternyata tidak hanya dapat disimak pada tahap-tahap awal tatkala para nasionalis mulai tergugah kesadarannya untuk berbangsa dan bertanah air pada tingkatnya yang supra dan transetnik. Samaipun pada tahap implementasi—ialah tatkala kehidupan nasional sudah hendak disempurnakan lewat usaha-usaha pembangunan—perkembangan ideologik yang anti-tradisi ini tetap saja kuat tersimak.

**Kesadaran Berbangsa dan Paham Kebangsaan di Indonesia**

Sebagaimana kehidupan kebangsaan di banyak negeri bekas jajahan —antara lain juga di Indonesia— adalah sesungguhnya juga fenomena dan realitas abad 20. Model kehidupan seperti ini mulai dikenal di negeri-negeri jajahan dan bekas jajahan, ialah tatkala "para tuan kolonial" mulai mencoba memperkenalkannya —melalui lembaga-lembaga pendidikan modern yang mereka dirikan—kepada elit-elit terpelajar di negeri-negeri jajahannya itu. Di

dasawarsa-dasawarsa pertama abad 20. Sebelum itu tidak pernah ada dan tidak pernah dikenallah apa yang disebut bangsa atau 'nasion' Indonesia itu. Bahkan nama dan kata Indonesia itu sendiri pun tak dikenal secara umum pada satu dua dasawarsa pertama abad 20 itu.

Bangkitnya kesadaran berbangsa, yang kemudian disusul oleh lahirnya paham kebangsaan di Indonesia, ditengarakan secara simbolik dengan penetapan suatu tanggal, ialah tanggal 20 Mei 1908. Manakala dikaji baik-baik, pada masa itu kesadaran berbangsa itupun terjadi di atas suatu konsep bahwa yang disebut bangsa — sebagai terjemahan istilah *volk* dalam bahasa Belanda—pada waktu itu ialah apa yang kini disebut sukubangsa. Itulah bangsa-bangsa tua yang mempunyai riwayat amat lama dalam sejarah Kepulauan Nusantara, ditengarai oleh bahasa dan tradisinya sendiri yang sungguh tua. Hari Ahad tanggal 20 Mei 1908 itupun apabila dikaji baik-baik menurut kebenaran sejarahnya sebenarnya merupakan hari lahirnya kesadaran untuk membangun kehidupan berbangsa di kalangan orang-orang Jawa saja, diprakarsai oleh para pemudanya yang tengah belajar seni kedokteran di Batavia, ibu kota negeri kolonial Hindia Belanda pada masa itu.

Dari riwayat yang bisa diceriterakan berdasarkan data sejarah ini, kesadaran berbangsa dalam definisinya yang baru sebagai bangsa Indonesia, yang mengatasi kesadaran

dasawarsa-dasawarsa berikutnya, sebagian yang penting bahkan bermula di tanah rantau yang bernama Negeri Belanda. Pada waktu itu para mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Negeri Belanda mengambil-alih kepemimpinan suatu organisasi yang telah ada sebelumnya, dan sekaligus mengganti nama organisasi itu dari '*Indische Vereeniging*' ke namanya yang baru, '*Indonesische Vereeniging*'. Organisasi dengan kepemimpinan baru ini, yang 2 tahun kemudian resmi bernama 'Perhimpunan Indonesia', tak lagi mau berkegiatan di bidang seni-budaya kedaerahan 'Tanah Hindia' yang *adi luhung* dan *Java centris*, dalam alur aliran seni *Mooie Indie* (Tanah Hindia yang Indah) seperti yang dijadikan program utama '*Indische Vereeniging*'. Dengan menerbitkan majalah 'Indonesia Merdeka', aktivitas organisasi dengan nama baru ini nyata kalau sudah hendak terang-terangan bergerak dengan program-program politik kebangsaan meninggalkan aktivitas organisasi sebelumnya yang lebih bemuansa kebudayaan dan seni-budaya lokal-etnik.

Kesadaran berbangsa dan gerakan kebangsaan yang bermula di Negeri Belanda di kalangan mahasiswa yang datang dari berbagai suku "Tanah Hindia" ini berlangsung terus sepanjang dasawarsa 1920-an. Gerakan merebak juga di tanah air, dimarakkan juga oleh kedatangan para alumni yang tercatat sebagai aktivis gerakan Indonesia Merdeka di Negeri Belanda.

dan solidaritas kebangsaan Indonesia Baru ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, ialah tatkala para pemuda pelajar bersumpah untuk bertanah air, berbangsa dan berbahasa yang satu, ialah Indonesia. Tanggal inilah yang harus dianggap titik alih yang mengubah definisi bangsa dan kebangsaan di negeri ini, dari definisi lama yang mengartikan bangsa sebagai satuan etnik tua yang berealitas kultural ke definisinya yang baru sebagai satuan kolektiva baru yang lebih komprehensif dan berskala luas dalam realitasnya yang lebih politis.

Itulah peralihan, yang kian tahun kian berlangsung kian cepat, yang—merujuk ke apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz—dapat dikenali sebagai proses *from old (ethnic) societies to a new (nation) state*. Peralihan inipun dapatlah disimak sebagai peralihan dari wujud satuan-satuan kolektiva etnik yang objektif ke wujudnya yang baru sebagai suatu satuan kolektiva baru yang lahir dan terjadinya bangsa, ditengarai oleh diucapkannya sumpah pengakuan bertanahair, berbangsa dan berbahasa yang satu: Indonesia! Itulah pengakuan yang melahirkan suatu realitas baru di ranah alam kesadaran manusia yang subjektif itu, untuk kemudian mengembang—atau harus dikembangkan—menjadi suatu solidaritas sosial yang inter-subjektif, terobjektivisasi dalam pola perilaku warga masyarakat yang nyata dari hari ke hari (sebagaimana dinyatakan dalam konsep Ernest Renan sebagai

Yang masih menjadi persoalan ialah, bagaimana menjadikan kesadaran dan solidaritas kebangsaan baru yang telah berhasil marak dan merebak di ranah subjektivitas para pemuda pelajar dan para elit pemuka di negeri ini juga terobjektivisasi menjadi pola perilaku sehari-hari khalayak ramai. Manakala 'Sumpah Pemuda 1928' hendak dimaksudkan untuk melantangkan kehendak menyatukan fragmen-fragmen suku tua ke dalam satuan bangsa baru, upaya untuk merealisasi maksud seperti itu tidaklah bisa diharapkan akan dapat berjalan dengan mudah. Upaya dengan mencoba memperbaharui ikrar memang sering dipandang perlu untuk maksud ini.

Akan tetapi patutlah diingat, bahwa 'ikrar' untuk menyatakan kehendak untuk menyatu—yang sesungguhnya lebih bertaraf lanjut dari sekadar bersatu—sebagai suatu bangsa baru tidaklah bisa dicukupkan hanya dengan mengulang seremoni-seremoni yang hanya bermakna sebagai replika naif Sumpah Pemuda dari tahun 1928. Sesungguhnya, seperti yang juga pernah ditegaskan oleh Renan, keinginan untuk bersatu sebagai satu bangsa itu harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (dan tidak cuma dalam orasi retorik setahun satu-dua kali). Sayangnya, sampai pun saat ini, di Indonesia ini orang masih lebih suka berkata-kata lantang tentang kesatuan dan persatuan daripada berperilaku terjih yang riil dalam kehidupan sehari-

hari untuk menyatakan semangat, paham dan komitmen kebangsaannya.

### Nasionalisme dan Masa Depan Indonesia

Kehidupan nasional yang terkesan kian runyam dewasa ini sesungguhnya tidak cuma terjadi sebagai akibat terlupakannya ikrar untuk berbangsa yang satu. Secara teoretik dapatlah dihipotesiskan bahwa semua itu terjadi sebagai akibat kegagalan mentransformasi realitas nasionalisme sebagai ide subjektif di alam imajinasi para elit yang berposisi sentral di struktur pemerintahan ke ranahnya yang lebih riil dan objektif sebagaimana wujudnya sebagai perilaku kultural warga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kegagalan ini hanya akan menghidupkan kembali berbagai nasionalisme lokal —yang dikenali dengan istilah etno-nasionalisme— di berbagai daerah negeri ini. Etno-nasionalisme adalah nasionalisme yang lebih riil dan konkret, dan amat nyata kalau lebih mengedepankan kembali konsep nasionalisme klasik yang mendefinisikan bangsa sebagai satuan manusia yang menurut mitosnya sedarah keturunan, dan yang dalam ranah empiriknya lebih tersimak dalam wujud hadirnya kesamaan tradisi dan bahasa yang berlaku eksklusif.

Etno-nasionalisme seperti ini manakala terhidupkan dan menguat kembali di dalam kehidupan kebangsaan di negeri-negeri bekas daerah jajahan —yang (karena tak bisa

bersuku-suku yang majemuk— hanya akan melahirkan fragmentasi dan separasi saja dalam kehidupan kebangsaan. Tidak hanya Srilanka atau Irak atau Ghana yang mengalami masalah pelik yang dilahirkan oleh menguatnya kembali etnonasionalisme ini, Indonesia pun mengalaminya. Di Indonesia, debat mengenai pilihan untuk membangun kehidupan berbangsa atas dasar paham nasionalisme baru yang mengatasi eksistensi suku-suku tua ataukah atas dasar paham etno-nasionalisme sebenarnya telah pernah berlangsung pada tahun-tahun 1918. Inilah debat yang terkenal antara Tjipto Mangoenkoesoemo dari *Indische Partij* dan Soetatmo Soerjokoesoemo dari *Comitee voor het Javaansche Nationalisme* yang berlangsung di Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa di Solo, namun yang telah dilupakan dalam kajian sejarah politik dan sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Manakala Tjipto Mangoenkoesoemo merupakan representasi nasionalis yang merindukan terwujudnya Republik Hindia yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih tegak waktu itu, Soetatmo Soerjokoesoemo adalah representasi nasionalis yang merindukan terwujudnya kerajaan Jawa yang dipermodern sesuai dengan tuntutan zaman. Menurut Soetatmo, nasionalisme sebagaimana yang terkonstruksi di dalam benak Tjipto akan berkonsepkuasi pada terwujudnya

hakikatnya adalah kelanjutan saja dari model asing yang *Europeesch* sebagaimana yang dibangun dan diperkenalkan oleh para penguasa kolonial. Tidakkah model klasik yang bertumpu pada kearifan tatanilai dan tradisi budaya setempat akan lebih mendekatkan bangsa-bangsa di daerah jajahan ini untuk kembali ke kepribadiannya yang asli.

Dalam perkembangan yang lebih kemudian, konsesi dan kompromi sebenarnya telah tercapai. Sumpah Pemuda 1928, misalnya, sekalipun mengikrarkan kesatuan tanah air, kebangsaan dan kesetiaan berbahasa sebenarnya masih membukakan peluang untuk menenggang kemajemukan etnisitas. Pernyataan yang ikut disuarakan dalam acara Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itupun menjanjikan bahwa hukum di masa depan akan berasaskan hukum adat yang sebenarnya berkarakter kedaerahan itu. Sila yang disepakat-kan pada tahun 1945 sebagai sila ketiga —atau sila yang disebut juga sila kebangsaan— pun bukan sila yang berbunyi 'Kesatuan Indonesia' melainkan 'Persatuan Indonesia'. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjanjikan otonomi daerah yang luas haruslah pula dicermati sebagai isyarat bahwa kebangsaan dan ketatanegara-an bangsa Indonesia tidaklah hendak didasarkan pada paradigma kesatuan yang mutlak melainkan yang persatuan antar-daerah itulah.

Sudah waktunya para nasionalis

masalah nasionalisme itu. Hanya dengan kesediaan untuk mengkaji dan merenungkan kembali secara kritis persoalan ini dapatlah suatu simpulan ditarik dan menyimpulkan dengan penuh kearifan manakah pilihan konsep yang paling mungkin direalisasi di tengah kenyataan sosial-kultural yang sungguh majemuk.

Pengakuan bahwa kehidupan di negeri ini adalah kehidupan yang *bhineka tunggal ika* sudah waktunya direnungkan dan dikaji ulang, tidaklah harus lagi diartikan 'sekalipun berbeda-beda tetapi sesungguhnya satulah itu' melainkan dipahami dalam isyaratnya yang baru. Ialah, bahwa 'sekalipun satu namun sesungguhnya berbeda-bedalah' itu. Kesadaran dan gagasan tentang adanya perbedaan sosial-kultural, namun dengan tetap *posseder la desire d'etre ensemble* inilah kiranya yang akan lebih dapat memecahkan masalah.

Inilah kesadaran dan ideologi yang disebut 'pluralisme', yang toh tetap dapat diterima juga kehidupan politik nasional yang dilandaskan pada ide unitarianisme. Pluralisme akan mengakui peran massa awam nonelit yang sesungguhnya lebih berkemampuan untuk bertransaksi lintas kultural secara riil dan otonom dari hari ke hari, dan yang karena itu dalam kenyataannya juga akan lebih berkemampuan mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar-etnik). Sudah waktunya semua insan nasionalis menyadari bahwa

landasan yang telah menghadirkan realitas *one world, different but never divided*, di mana nasionalisme akan dipaksa kian bersatu wajah dengan humanisme. Di sini, manakala dan tatkala semangat kebangsaan telah kian menyatu dengan semangat kemanusiaan—seperti yang diaku oleh Mahatma Gandhi: bahwa '(my) *nationalism is (my) humanism*—paham kebangsaan akan tidak lagi layak berparadigma kesatuan (mengatasi perbedaan), melainkan sudah kian berparadigma persatuan (di atas perbedaan-perbedaan). Bukankah perbedaan itu—seperti yang pernah dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W.— adalah sesungguhnya sebuah rahmat?

### Acuan Kepustakaan

- Anderson, Benedict  
1991 *Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Bachtiar, Harsja W.  
1992 *Integrasi Nasional Indonesia, dalam Wawasan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Bakom PKB Pusat, hlm. 7-55.
- Billig, Michael.  
1995 *Banal Nationalism*. London: Sage Publications.
- Gellner, Ernest,  
1993 *Nations and Nationalism*. London: Basil Blackwell
- Horsman, Mathew dan Andrew Marshall  
1995 *After the Nation State: Citizens, Tribalism and The New World Order*. London: Harper Collins.
- Hutchinson, John dan Anthony D. Smith, (eds.)  
1994 *Nationalism*. Oxford: Oxford University Press hlm. 3-159, dan 287-325.
- James, Paul.  
1996 *Nation Formation: Towards a Theory of Abstract Community*. London: Sage Publication
- Nagazumi, Akira.  
tt *Masa Awal Pembentukan 'Perhimpunan Indonesia': Kegiatan Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, 1916-1917*.
- Nagazumi, Akira (ed.)  
1986 *Indonesia dalam kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX & XX dan berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 133-157.
- Poeze, Harry A. dan Cees van Dijk dan Inge van der Meulen  
tt *In Het Land van de Oberverheerser: Indonesiers in Nederland 1600-1950*. hlm. 157-330.
- Shirahazi, Takashi.  
1986 *Satria Vs Pandita: Sebuah*

dalam Akira Nagazumi, (ed.)  
*Indonesia dalam kajian  
 Sarjana Jepang: perubahan  
 Sosial Ekonomi Abad XIX &  
 XX dan berbagai Aspek  
 Nasionalisme Indonesia.*  
 Jakarta: Yayasan Obor,  
 hlm.158-187.

Smith, Anthony D.

1986 *The Ethnic Origins of  
 Nations.* London: Basil  
 Blackwell.

Wertheim, W.F.

1956 *Indonesian Society in  
 Transition.* Bandung: W. van  
 Hoeve, hlm. 309-332.

